

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



Focus Group Discussion (FGD)

“Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

Pontianak (12/11/18) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan acara FGD “Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel” pada hari ini, Senin, 12 November 2018 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada entitas tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memperoleh komitmen dari Kepala Daerah untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan mendiskusikan kendala yang dihadapi entitas dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta menyepakati alternatif solusinya. Selain itu kegiatan FGD ini juga, diarahkan untuk memberikan penyegaran pemahaman kepada pejabat terkait di Pemerintah Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pencegahan terjadinya praktek praktek yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Peserta FGD antara lain Kepala Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta beberapa staf dari Inspektorat dan BPKAD. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Barat, Asisten Pidana Khusus Kejati Kalimantan Barat serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam sambutan sekaligus pemaparan materi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, **Joko Agus Setyono** menekankan pentingnya, dan bagaimana proses, tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2015 s.d. 2019 dan kondisi yang diharapkan dalam kaitannya dengan tata kelola keuangan daerah. Selain itu Kepala Perwakilan juga menegaskan dokumen dan data-data yang harus diserahkan oleh Pemda kepada BPK dalam rangka untuk mendukung proses pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPK, sehingga berbagai potensi penyimpangan dapat segera diingatkan sebelum terjadi lebih lanjut. Beberapa kelemahan dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah antara lain, proporsi

belanja terbesar adalah belanja pegawai dan belanja lain-lain, belanja untuk kepentingan pelayanan publik masih rendah. Desentralisasi Fiskal, masih rendah. Ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi, khususnya untuk Pemerintah Kabupaten. Sedangkan terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRH), walaupun capaian persentase TLRHP di Wilayah Kalimantan Barat di atas rata-rata persentase TLRHP Nasional (se-Indonesia), namun untuk capaian TLRHP yang terkait dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama Perwakilan yang dihitung dari kegiatan TLRHP selama lima tahun anggaran terakhir, masih rendah capaiannya walaupun dari target tercapai. Namun karena capaiannya tidak terlalu tinggi berdampak terhadap rencana pencapaian persentase TLRHP dalam Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan periode 2016-2020. Hal ini mengakibatkan dalam Perjanjian Kerja terkait IKU Penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Kalbar tidak dapat menyelaraskan dengan target dalam Renstra. Target penyelesaian TLRHP dalam Renstra untuk tahun 2018 sebesar 70% hanya dapat dicantumkan dalam Perjanjian Kerja sebesar 65% karena capaian tahun 2017 yang walaupun tercapai targetnya tapi hanya lebih sedikit dari target realisasi Perjanjian Kerja BPK Perwakilan Kalbar. Target IKU Penyelesaian TLHP tahun 2017 sebesar 65% dan terealisasi 65,59%.

Berbagai upaya telah dilakukan dengan adanya Pernyataan Komitmen antar Kepala Daerah dengan Inspektur untuk peningkatan penyelesaian sampai dengan Semester II Tahun 2017, namun demikian persentase dalam komitmen tersebut sebagian besar tidak tercapai. Sehubungan hal tersebut, maka setelah FGD ini, kembali dibuat Pernyataan Komitmen Kepala Daerah yang diketahui oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Pernyataan Komitmen tersebut berisi bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperkuat upaya peningkatan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, Kepala Daerah Berkomitmen untuk mendorong seluruh perangkat daerah agar melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melalui:

- a. Meningkatkan pola hubungan kerja yang lebih baik antara Inspektorat dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- b. Inspektorat melakukan validasi secara periodik atas kemajuan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- c. Inspektur melaporkan perkembangan hasil penyelesaian tindak lanjut setiap tiga bulan kepada Kepala Daerah; dan
- d. Kepala Daerah menetapkan tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai indikator kinerja utama pada masing-masing kepala OPD dalam

rangka penilaian kinerja.

Materi-materi lain yang disampaikan dalam acara FGD ini yaitu:

- a. Gubernur Kalimantan Barat, **Sutarmidji** menyampaikan mengenai “Peran Kepala Daerah dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”.
- b. Kapolda Kalimantan Barat, **Didi haryono** menyampaikan mengenai “Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah”
- c. Aspidus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, **M. Mikroj** menyampaikan materi mengenai “Peran Kejaksaan dalam Pencegahan Pidana Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah”,
- d. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, **Raden Suhartono** menyampaikan materi mengenai “Peran dan Upaya BPKP dalam Peningkatan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel Melalui Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP”.

Adapun moderator dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, **Agvita Windiadi**.

**SUBBAGIAN HUMAS & TU
KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI
KALBAR**